

#### GUBERNUR PAPUA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 255 TAHUN 2024

#### TENTANG

# PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEIYAI PERIODE 2024-2029

#### GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Lampiran

: 2 (dua)

#### GUBERNUR PAPUA TENGAH,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai hasil Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang diusulkan oleh Bupati Deiyai kepada Gubernur Papua Tengah, dan dilakukan verifikasi dan validasi penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya;
- c. bahwa Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Periode 2019-2024 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu meresmikan pemberhentiannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan:

- Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024;
- 2. Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 16 Juni 2024;
- 3. Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 30 September 2024;
- 4. Berita Acara Nomor: 89/PL.01.9-BA/9408/2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024;
- 5. Surat Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Nomor: 007.3/SET.DPRD/2024 Perihal: Permohonan Pengurusan SK DPRD Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 tanggal 4 November 2024;
- 6. Surat Bupati Deiyai Nomor: 11.2/XI/BUP.DEY/2024 tanggal 12 November 2024;
- 7. Surat Pernyataan dan Keabsaan dan Kebenaran Dokumen tanggal 03 Desember 2024;
- 8. Surat KPU Kabupaten Deiyai Nomor: 213/PL.01.9-SD/9408/2024 Perihal: Penyampaian Hasil Pemilu Legislatif DPRD 2024 tanggal 5 Desember 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 yang Nama, Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Jumlah Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA

: Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai. **KEEMPAT** 

: Meresmikan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 9 Desember 2024 Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM.

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP. 19760608 200212 1 002

#### Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
- 6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 8. Bupati Kabupaten Deiyai di Waghete;
- 9. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
- 10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai di Waghete;
- 11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR: 255 TAHUN 2024 TANGGAL: 9 DESEMBER 2024

## DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEIYAI PERIODE 2024-2029 YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	DERIK PAKAGE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	2.305
2.	STEFANUS MOTE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	928
3.	ОВЕТ КОТОИКІ	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	2.741
4.	GERGORIUS MOTE	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	3.392
5.	DAMES PEKEY	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	3.192
6.	SERAPIANUS MOTE	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1.867
7.	SIMON P IKOMOUW	PARTAI UMAT	1	2.790
8.	PABIANUS DOO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	2.384
9.	SIMON EDOWAI	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1.453
10.	SEBASTIANUS MOTE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	2.487
11.	LINUS KOTO	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	2.229
12.	YANUARIUS DOO	PARTAI UMMAT	2	2.443
13.	YASON EDOWAI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	1.548
14.	SIMON DAWAPA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANG	3	1.843
15.	MELIANUS BADII	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	2.295
16.	FELIKS GIYAI	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	3	2.342
17.	HERMAN BADOKAPA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	1.671
18.	YAVET PIGOME	PARTAI BULAN BINTANG	3	1.249
19.	ALEX DOUW	PARTAI PERINDO	3	12
20.	ANTIPAS PEKEI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	1.040

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP. 19760608 200212 1 002

#### LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR: 255 DESEMBER 2024 TANGGAL: 9 DESEMBER 2024

## DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEIYAI PERIODE 2019-2024 YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	MARKUS MOTE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1.628
2.	NAFTALI MAGAI, S.Pd	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1.500
3.	ALPIUS MOTE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	1.387
4.	GERGORIUS MOTE	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1.230
5.	ESEKEL ADII	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	1.415
6.	HENDRIK ONESMUS MADAI	PARTAI BERINGIN KARYA	1	1.626
7.	MATIUS DOGOPIA	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	1.247
8.	OLIS PAKAGE	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	1.101
9.	YUSUF MOTE	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1.865
10.	YUSTUS KOTO	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1.222
11.	BENYAMIN PAKAGE	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1.107
12.	BONVASIUS TOBAI	PARTAI DEMOKRAT	1	1.200
13.	YASON EDOWAI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	1.322
14.	VELEKS PIGOME	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	1.050
15.	YOHANES TEKEGE	PARTAI BERINGIN KARYA	2	1.092
16.	DEMIANUS AGAPA	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2	1.358
17.	ZEFANYA AGAPA, S.Th	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	727
18.	PETRUS BADOKAPA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	2.410
19.	DEMIANUS EDOWAI, ST	PARTAI DEMOKRAT	2	1.212
20.	YEKI AUWE	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	1.539

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO, HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP. 19760608 200212 1 002